

FLYPAPER EFFECT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA PAREPARE

Flypaper Effect Of General Allocation Fund (Gaf) And Local Own-Source Revenue (Losr) Towards Regional Expenditure Of Parepare City

Ishak. KS ¹⁾, Rudy Arafah ²⁾, Hasnah M ³⁾

Email: ishakmilaparersu@gmail.com¹⁾, rudiarafah@yahoo.co.id ²⁾, hasnahm.mansur97@gmail.com³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstract

Unconditional grants that are proxied by the General Allocation Fund are determined based on the fiscal space, namely the fiscal needs minus the regional fiscal capacity and the basic allocation allocated as a lump (lump sum) from the central government. This study aims to determine the Flypaper Effect on General Allocation Fund (GAF) and Local Own Source Revenue (LOSR) towards regional expenditure of Parepare City. This research uses descriptive method, the research is conducted to find out the value of the independent variable, either one or more variables (independent) without making comparisons, or connecting with other variables. To find out the value of variables without making comparisons or connecting with other variables, where the variables in the study are regional income sourced from regional expenditure based on GAF and LOSR. The results showed that the Flypaper Effect occurred in the General Allocation Fund and Local Own-Source Revenue toward Regional Expenditure in the Regional Government of Parepare City in the 2014-2018 period. The Flypaper Effect occurs because in this case the General Allocation Fund is used first for Regional Expenditure rather than Local Own-Source Revenue.

Keywords: *Flypaper effect; General Allocation Fund; Local Own-Source Revenue*

Abstrak

Unconditional grants yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (lump sum) dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Flypaper Effect terhadap dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Untuk mengetahui nilai dari variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, dimana variabel dalam penelitian adalah pendapatan daerah yang bersumber dari belanja daerah berdasarkan PAD dan DAU. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kota Parepare periode 2014-2018. Flypaper Effect terjadi karena Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum digunakan lebih dulu untuk Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: *Efek Flypaper; Dana Alokasi Umum; Pendapatan Asli Daerah.*

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) secara bersama dibantu perangkat daerah. Agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan sesuai maka pemerintahan

diserahkan berdasarkan kebijakan nasional, dimana presiden berkewajiban melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah menggantikan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004.

Perkembangan Kota Parepare sampai saat ini semakin pesat terlebih bagian pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan mulai dari tahun 2014-2016. Setelah melalui pembahasan beberapa, APBD pokok tahun 2018 oleh DPRD Kota Parepare akhirnya disahkan. Angka yang disetujui, sebesar Rp 875,36 miliar jauh lebih rendah dibanding APBD tahun 2017 lalu yang menembus angka Rp 1,003 triliun.

Turunnya angka APBD tahun 2018 dipicu karena dana transfer dari pusat juga mengalami pengurangan. Hal tersebut berdampak pada keuangan daerah Kota Parepare dan terjadi hampir diseluruh daerah. *Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah dimana yang membelanjakan lebih banyak dan lebih boros dengan menggunakan dana transfer atau Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri atau Pendapatan Asli Daerah.

Istilah *Flypaper Effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Ramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan "money sticks where it hits". *Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Maimunah dalam deni oktavia, 2014).

Flypaper Effect itu sendiri merupakan respon yang tidak simetris atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, dimana Tresch (2002) menyatakan dalam Amalia (2015) bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain penemuan *Flypaper Effect* pada alokasi pengeluaran, maka diharapkan pemerintah dapat seminimum mungkin memperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah. Analisis mengenai *Flypaper Effect* mengandung dua prinsip dasar yaitu: 1) model yang menunjukkan bagaimana pemerintah merespon bantuan dana transfer (*grants*) yang akan digunakan untuk mengukur demand pelayanan publik; 2) model median (rata-rata) merupakan model yang dipilih untuk melihat respon transfer per wilayah yang menerima bantuan dana transfer dari pemerintah, dimana pemerintah melihat ada indikasi bahwa dana yang diberikan harus habis untuk dibelanjakan, sehingga anggapan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan daerah mereka sendiri. (Tresch dalam Fitri Amalia: 2015).

Flypaper Effect terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini melakukan pengeluaran yang berlebih. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah. *Flypaper Effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *Unconditional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Flypaper Effect* terhadap dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah Kota Parepare. *Unconditional grants* yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (lump sum) dari pemerintah pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah dan dikhususkan pada bagian anggaran Kota Parepare. Subjek penelitian meliputi kepala bagian anggaran, kepala sub bagian anggaran, pengembangan dan evaluasi program BAPPEDA dan anggota DPRD Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, data-data angka yang diperoleh dari laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan dideskripsikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai dari variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, dimana variabel dalam penelitian adalah pendapatan daerah yang bersumber dari belanja daerah berdasarkan PAD dan DAU.

Data dikumpulkan dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang bersumber dari informan ahli, dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dimiliki daerah masing-masing dari aktivitas-aktivitas operasional daerah, seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Parepare berasal dari pajak daerah dan Retribusi. Selain dari pajak dan retribusi juga berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare Tahun 2014-2018.

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi
2014	Rp 86.131.560.841,00	Rp 112.070.946.227,51
2015	Rp 122.188.461.211,00	Rp 115.369.532.648,35
2016	Rp 138.015.117.571,00	Rp 136.313.232.054,73
2017	Rp 140.990.173.492,00	Rp 140.621.664.388,48
2018	Rp 150.834.948.804,00	Rp 133.500.671.961,76

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2014-2018

Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare pada tahun 2014 dianggarkan tidak lebih dari 100 milyar tetapi dalam realisasinya melebihi 100 milyar, dikarenakan pada tahun 2014 penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dialihkan ke Pemerintah Daerah, dimana jumlah minimal penerimaan BPHTB sekitar 60 juta rupiah dalam setiap tanah atau bangunannya. Tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare, realisasi tidak melebihi anggaran yang di targetkan akan tetapi Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare meningkat dari tahun sebelumnya.

Tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare juga realisasi masih belum mencapai jumlah yang dianggarkan dan realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kota Pare masih sama pada tahun 2015 dan 2016 yaitu realisasi tidak melebihi anggaran yang ditargetkan, namun selisih anggaran dan realisasi tidak begitu banyak. Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare realisasi tidak melebihi target disebabkan oleh sebagian potensi pajak Pendapatan Asli Daerah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pencapaian realisasi disetiap SKPD atau Rumah Sakit di Kota Parepare

masih belum maksimal.

Tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah Kota Pare pada tabel 5.2 juga realisasi masih belum melebihi anggaran, data tersebut merupakan data Unaudit, ini disebabkan oleh masih belum rampungnya perhitungan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare yang dilakukan ditahun 2018. Namun menurut Kelapa Bidang Anggaran,tahun 2018 sudah mencapai 90% dari hasil perhitungan.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk pemerataan keuangan daerah yang bertujuan mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Hadianti, 2013; Marizka, 2013).Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki sifat final dimana jumlah dana yang di Alokasikan oleh pemerintah pusat sama dengan jumlah dana alokasi yang diterima Pemerintah Daerah. DAU merupakan dana transfer yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat yang apabila penggunaan Dana Alokasi Umum oleh Pemerintah Daerah tidak habis, maka sisa dana dari Dana Alokasi Umum tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Pusat, maka dari itu Dana Alokasi Umum selalu habis terpakai disetiap tahun. Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah Kota Parepare oleh Pemerintah Pusat tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Jumlah Dana Alokasi Umum Kota Parepare Tahun 2014-2018.

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi
2014	Rp 426.405.955.000,00	Rp 426.405.955.000,00
2015	Rp 430.750.753.000,00	Rp 430.750.753.000,00
2016	Rp 462.883.790.000,00	Rp 462.883.790.000,00
2017	Rp 454.752.410.000,00	Rp 454.752.410.000,00
2018	Rp 454.752.410.000,00	Rp 454.752.410.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2014-2018

Dana Alokasi Umum sangatlah tinggi dan dapat dilihat bahwa realisasi Dana Alokasi Umum selalu habis terpakai dan setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2017 Dana Alokasi Umum Kota Parepare mengalami penurunan, penurunan Dana Alokasi Umum Kota Parepare disebabkan oleh penerimaan Negara yang mengalami juga penurunan dan ditahun 2018 jumlah Dana Alokasi Umum Kota Parepare masih sama pada tahun 2017 yang tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan disebabkan oleh tidak stabilnya keuangan Negara.

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah Kota Parepare pada tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Jumlah Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2014-2018.

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi
2014	Rp 711.954.276.729,00	Rp 614.787.845.061,10
2015	Rp 987.033.211.482,00	Rp 784.187.002.833,99
2016	Rp 1.186.572.478.390,00	Rp 986.775.184.897,85
2017	Rp 1.135.258.903.984,00	Rp 969.858.823.855,31
2018	Rp 864.312.881.077,00	Rp 790.286.728.353,22

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2014-2018

Jumlah Belanja Daerah Kota Parepare tahun 2014 menembus angka Rp 700 miliar yang didalamnya sudah termasuk Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung. Hingga tahun 2016 Belanja Daerah Kota Parepare terus meningkat. Tahun 2017 dan 2018 Belanja Daerah Kota Parepare mengalami penurunan, yang dapat dilihat pada tabel diatas. Peningkatan Belanja Daerah pada tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar Rp 275.078.934.753,00, tahun 2015 ke tahun 2016 Rp 199.539.266.908,00.

Tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 51.313574.406, tahun 2017 ke 2018 sebesar Rp 270.946.022.907. Realisasi Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan Anggaran yang telah dianggarkan terkait adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare yang belum selesai hingga batas yang telah ditentukan, dan juga adanya hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan tersebut, sisa tender, sisa belanja seperti pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK). Belanja Daerah dalam realisasinya tidak dapat mencapai 100% dikarenakan persentasi belanja daerah yang normal biasanya berada pada 85%.

Pembahasan

Dari hasil tersebut dapat dikatakan telah terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Daerah Kota Parepare karena lebih didominasi oleh Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutupi Belanja Daerahnya. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam mengurangi potensi terjadinya *Flypaper Effect* di Kota Parepare, yaitu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan memperbaiki karakter atau moral pengelola Pendapatan Asli Daerah, sistem penagihan dan penetapan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah, serta melakukan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain.

Tahun 2018 telah diterapkan pajak bagi pengusaha sarang burung walet di Kota Parepare dan di tahun 2019 ini Pemerintah Daerah Kota Parepare akan mulai menerapkan pembayaran pajak daerah secara online yang dikerjasamakan oleh Bank Sulselbar Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare mengusahakan agar tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat akan berkurang, karena Pemerintah Kota Parepare masih sulit untuk tidak bergantung kepada pemerintah pusat, dikarenakan Sumber Daya Alam yang terdapat di Kota Parepare masih minim dan kurang memadai dibandingkan dengan Sumber Daya Alam yang ada di daerah lainnya.

Kepala sub. Bidang data, pengembangan dan evaluasi program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare mengatakan bahwa penggunaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum digunakan secara bersamaan di Kota Parepare. Menurut beliau Pendapatan Asli Daerah dikumpulkan terlebih dahulu ke kas daerah sebelum digunakan. Sementara Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada awal tahun belum bisa digunakan, karena belum terserap sehingga untuk belanja pada awal tahun menggunakan Dana Alokasi Umum, dari kedua pernyataan tersebut menyatakan Kota Parepare mengalami *Flypaper Effect*.

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare berpendapat bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer yaitu Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum, karena jumlah Dana Alokasi Umum 5 kali lipat lebih besar dari pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah tidak bisa di maksimalkan, karena apabila Pendapatan Asli Daerah dimaksimalkan maka akan membebani rakyat, seperti peningkatan nilai pajak dan meningkatnya retribusi. Semakin besar dana transfer yang diterima semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pernyataan Kepala sub. Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, bahwa tujuan dari Dana Alokasi Umum, yaitu mampu mengurangi kesenjangan dan sebagai pemerataan. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer sangat besar, hampir semua pemerintah daerah di Indonesia memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sama seperti Kota Parepare yang jumlah Pendapatan Asli Daerahnya hanya sekitar 11% di dalam APBD Kota Parepare, sedangkan Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan digunakan untuk belanja pegawai dan membiayai infrastruktur daerah, karena jumlah Dana Alokasi Umum yang besar.

Flypaper Effect terjadi karena Pemerintah Daerah lebih menggunakan Dana Perimbangannya dibanding Pendapatan Asli Daerahnya untuk melaksanakan Belanja Daerahnya. Hal tersebut banyak terjadi di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia begitupun provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian terdahulu tentang *Flypaper Effect* sebagian besar menggunakan Regresi Linear Berganda lalu diolah dengan Program. DAU merupakan transfer

yang bersifat umum dan diberikan kepada semua kabupaten maupun kota (Oktora & Pontoh, 2013).

Penelitian *Flypaper Effect* yang menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdian Abdillah (2018) menyatakan semakin berkembang suatu daerah, semakin tinggi anggaran yang dibutuhkan maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Dilihat setiap tahunnya pada pemerintah daerah di Ajatappareng tingkat ketergantungan pada dana perimbangan mengalami peningkatan dikarenakan pendapatan asli daerah tidak bisa di maksimalkan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah.

Flypaper Effect terjadi karena Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerah, hal ini memang sudah menjadi hal pokok bagi Pemerintah Daerah karena belanja daerah terbagi menjadi 3 belanja operasi seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi dan lain-lain. Belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan lain-lain dan terakhir belanja tak terduga. Adapun pemerintah merespon Belanja Daerah mereka dengan melakukan belanja operasi dulu yakni belanja pegawai.

Pemerintah Daerah memenuhi belanja daerahnya dengan menggunakan Dana Alokasi Umum lebih banyak dari pada Pendapatan Asli Daerah karena jumlah Dana Perimbangan yang di terima pemerintah daerah Kota Parepare dari tahun 2014 – 2018 lebih besar 5 kali lipat dari pada jumlah Pendapatan Asli Daerahnya. Belanja Daerah tahun 2014–2018 di Kota Parepare mengalami peningkatan. Meningkatnya setiap tahun Belanja Daerah karena jumlah kegiatan yang meningkat juga. Ketergantungan dengan pemerintah pusat tidak bisa dipungkiri akan tetapi walaupun belanja daerahnya mengalami peningkatan, Pendapatan Asli Daerahnya juga meningkat. Jadi *Flypaper Effect* terjadi karena kegiatan Pemerintah Daerah yang meningkat sehingga potensi daerah mereka tidak bisa dimaksimalkan karena ketika potensi daerah dimaksimalkan akan membebani rakyat. *Flypaper Effect* mengimplikasikan bahwa peningkatan transfer mempengaruhi belanja daerah lebih besar dibanding penerimaan itu sendiri merupakan perilaku dari birokrat (Kuncoro, 2007; Pramuka, 2010).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kota Parepare periode 2014-2018. *Flypaper Effect* terjadi karena Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum digunakan lebih dulu untuk Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah, hal tersebut tidak bisa dihindari karena Pemerintah Daerah dituntut untuk menggunakan Dana Alokasi Umum lebih dulu untuk Belanja Daerah.

Pemerintah merespon Belanja Daerah dengan melakukan belanja operasi lebih dulu yakni belanja pegawai. karena Belanja Operasi dianggarkan untuk melaksanakan Belanja Pegawai atau membayar gaji Pegawai Negeri Sipil. Terjadinya Fenomena *Flypaper Effect* ini menyebabkan Belanja Daerah di Kota Parepare meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2014-2016 dan 2017-2018 mengalami penurunan disebabkan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare berkurang dikarenakan penerimaan Negara yang juga mengalami penurunan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, beberapa saran yang perlu dilakukan agar tidak terjadinya *Flypaper Effect* di Pemerintah Kota Parepare diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Parepare, untuk menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Parepare dan menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya dengan maksimal untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki manfaat ekonomi yang tinggi. Dibutuhkan pengkajian yang lebih mendalam tentang *Flypaper Effect* yang ada di Kota Parepare, sehingga Kota Parepare dapat memaksimalkan Potensi Daerahnya tidak hanya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A. (2018). *Flypaper Effect* : Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten/Kota di Daerah Ajatappareng Provinsi Sulawesi Selatan. *Economos* , 1-12.
- Amalia, F. (2015). Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen* Volume 11 Nomor 1 , 15-25.
- Hadiati, N. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena *Flypaper Effect* pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-29.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006–2011). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *ACCOUNTABILITY*, 2(1), 1-10.
- Pramuka, B. A. (2010). *Flypaper Effect* Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa.